

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM LEMBUR MADANI KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA

Ujang Dani Mardhloni Soleh¹

Program Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Email: exa2.cb@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Implementasi kebijakan dan lembur madani.

Pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat terus dilakukan di setiap daerah, termasuk di Kota Tasikmalaya. Program pembangunan berbasis masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan Walikota Tasikmalaya dalam bentuk program Lembar Madani dengan tujuan meningkatkan daya saing dan memiliki inovatif yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Penelitian menggunakan metode kualitatif naratif, yaitu bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena sosial baik individu maupun kelompok dalam suatu program dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu program kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan program Lembur Madani di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dalam mencapai tujuan kebijakan masih terdapat beberapa hambatan, diantaranya aspek lingkungan masyarakat yang kurang memberikan dukungan penuh terhadap program Lembur Madani, disamping aspek kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan organisasi kemasyarakatan, serta kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana program yang kurang didukung kemampuan dalam melaksanakan berbagai program kegiatan, ditambah dengan kurangnya kemauan dari tim pelaksana kegiatan untuk membimbing dan mengarahkan kelompok sasaran dalam mencapai tujuan kebijakan.

ABSTRACT

Key word:

Policy implementation and civil overtime.

Development through community empowerment continues to be carried out in every region, including in the City of Tasikmalaya. The community-based development program is outlined in the form of a Mayor of Tasikmalaya regulation in the form of the Madani Sheet program with the aim of increasing competitiveness and having innovations that arise from the community itself. This research uses a narrative qualitative method, which aims to analyze a social phenomenon both individuals and groups in a program by collecting data through in-depth interviews with individuals or groups involved in a policy program. Based on the results of the research, it shows that the Madani Overtime program in Cibeureum District, Tasikmalaya City, in achieving policy objectives, there are still several obstacles, including environmental aspects of the community that do not provide full support for the Madani

Overtime program, in addition to aspects of lack of communication and coordination between activity implementers and community organizations, and the ability which is owned by the program implementer who is not supported by the ability to carry out various program activities, coupled with the lack of the will of the activity implementation team to guide and direct the target group in achieving policy objectives.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai upaya dalam kehidupan masyarakat kurang mampu atau kurang mampu mencanangkan Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri dan Inovatif), dimana program tersebut dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga berbasis masyarakat (P3KK), perbaikan rutin, dan Program Wirausaha Baru (WUB). Fokus Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah pada rencana peningkatan kapasitas ekonomi daerah, kualitas tenaga kerja, pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Pemerintah Kota Tasikmalaya gencar melaksanakan rencana pembangunan, dan partisipasi masyarakat saat ini melalui Program Gema Madani yaitu Gerakan Masyarakat Mandiri, Kompetitif dan Inovatif (GEMA MADANI). Program Gema Madani 2016 merupakan varian dari Rencana Pemberdayaan Mandiri Kelurahan (P2KK) yang sebelumnya dikenal dengan Program Block Grant yang dimulai di Kota Tasikmalaya pada tahun 2002/2003. Program tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengembangan masyarakat dalam rangka pembangunan otonomi daerah.

Gerakan Komunitas yang mandiri dan berdaya saing diluncurkan sebagai upaya membangun partisipasi dalam membangun berbasis aspirasi bottom up atau bottom up. Melalui peran serta masyarakat maka kebutuhan yang paling penting akan dirasakan masyarakat, sehingga akan lebih mudah membangun mulai dari keluarga, lingkungan dan secara luas meningkatkan kemampuan ekonomi Kota Tasikmalaya.

Pelaksanaan Program Gema Madani didasarkan pada visi Pemerintah Kota Tasikmalaya. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tasikmalaya 2017-2022" mengacu pada Tasikmalaya yang beragama, maju dan beradab. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya melaksanakan rencana pemberdayaan masyarakat melalui rencana gerakan masyarakat yang mandiri dan berwibawa. Persaingan dan inovasi adalah model pembangunan berkelanjutan berdasarkan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan program dapat ditentukan sendiri oleh masyarakat, baik untuk perbaikan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.

Kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menyatakan bahwa bidang-bidang yang dapat dilaksanakan dalam Program Gema Madani meliputi bidang pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, serta sektor koperasi dan sosial / kemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan merupakan kesepakatan bersama di tingkat

kelurahan, dengan melibatkan dokumen-dokumen yang mengkaji rencana pembangunan di tingkat desa. Program yang termasuk dalam Program Lembur Madani adalah paguyuban atau paguyuban masyarakat, paguyuban masyarakat di suatu kecamatan dan ditetapkan sebagai model pembangunan yang komprehensif dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil.

Masyarakat sipil adalah masyarakat yang beradab, maju dan modern, setiap warga negara mengetahui dan mengetahui kewajiban dan haknya sebagai warga negara, bangsa dan agama, serta terhadap orang lain, dan menjaga hak asasi manusia. Program Lembur Madani merupakan bagian dari pengembangan potensi sosial dan budaya berbasis nilai-nilai lokal (I-PASBUD). Program Lembur Madani dirumuskan sebagai civil society mikro dengan tujuan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai masyarakat sipil.

Program Lembur Madani dalam pelaksanaannya masih belum efektif sesuai dengan tujuannya, khususnya di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Berbagai fenomena yang terjadi akibat belum efektifnya pelaksanaan program Lembur Madani di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya diantaranya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Lembur Madani, misalnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan Lembur Madani. di bidangnya, sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan program Lembur Madani masih kurang, misalnya dalam merencanakan program usulan kegiatan yang benar-benar dapat direalisasikan atas dasar prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, keterampilan komunikasi masing-masing pelaksana kebijakan masih kurang, termasuk kemampuan mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Lembur Madani dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta dengan lembaga sosial lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan sering disebut sebagai suatu keputusan atas dasar usulan individu, kelompok maupun dari pemerintah itu sendiri, dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi untuk dicarikan solusinya. Kebijakan umumnya timbul dikarenakan adanya persoalan atau masalah yang harus segera diselesaikan baik dalam organisasi bersifat private maupun organisasi publik atau pemerintah. Suatu keputusan yang diambil sebagai salah satu kebijakan memerlukan berbagai pertimbangan yang matang, sehingga keputusan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan menggunakan cara-cara atau sumber daya yang dimilikinya agar tujuan dapat tercapai.

Setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah berfungsi sebagai agen perubahan dalam menentukan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan untuk kebijakan publik dan pemerintahan itu sendiri. Pemerintah dapat dipandang sebagai pusat yang memberikan kontribusi untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan bagi pemerintah daerah, melakukan kajian, penerapan, dorongan dan implementasi dalam upaya good governance baik untuk sektor publik maupun swasta,

menjalin jejaring dengan berbagai institusi pemerintahan, akademisi, Non-Pemerintah dan asosiasi lain baik di dalam maupun luar negeri.

Kebijakan yang berkaitan dengan publik urusan masyarakat atau publik, disebut dengan kebijakan publik, yaitu suatu keputusan yang dibuat oleh Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau publik untuk dicarikan jalan keluarnya dengan menggunakan metode-metode, atau cara-cara yang memungkinkan dalam penyelesaian permasalahan atau persoalan yang dihadapi tersebut. Kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah merupakan hasil dari kesepakatan berupa keputusan-keputusan yang diambil secara politis antara Pemerintah dan Legislatif dengan memiliki pandangan yang sama terhadap permasalahan yang harus diselesaikan sebagai pengelola negara.

Istilah kebijakan sebagaimana yang telah didefinisikan (Hoogerwerf, 1992, hal. 3–4), dapat dijelaskan bahwa kebijakan dapat digambarkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangkaian waktu tertentu. Kebijakan semacam jawaban atas pertanyaan tersebut, dan kebijakan merupakan sebagai upaya, atau tindakan terarah, untuk menyelesaikan, mengurangi, atau mencegah masalah dengan cara tertentu. Kebijakan secara terminologi tersebut merupakan praktik sosial yang berupaya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul guna menyelesaikannya.

Definisi lain tentang kebijakan, dikemukakan oleh Nigro & Nigro (Kusnandar, 2012, hal. 6) dengan menyatakan: "Policy is made by legislature in the form of laws and carried out by the executive branch". Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa kebijakan dibuat oleh badan legislatif dalam bentuk undang-undang dan dilakukan oleh badan eksekutif. Kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah merupakan sebuah kebijakan publik, dimana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara langsung, atau dibuat turunannya maupun dalam bentuk suatu program.

Secara garis besar, kebijakan publik meliputi tahapan perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pemerintah mengembangkan dan memperoleh legitimasi legislatif dari kebijakan publik dan memungkinkan birokrat mengambil tindakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, dalam menyusun suatu kebijakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dikembangkan dan dilaksanakan dengan baik.

Setiap kebijakan harus dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuannya, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sekumpulan proses kebijakan yang berperan penting dalam mencapai tujuan kebijakan yang dibuat dan ditentukan. Implementasi merujuk pada implementasi atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Definisi tentang implementasi kebijakan (Rusli, 2015, hal. 85) mengemukakan: "Implementasi kebijakan (policy implementation) merupakan tahap pelaksanaan dari desain kebijakan yang telah dirumuskan (policy formulation).

Salah satu pendekatan untuk memikirkan kebijakan publik adalah melihatnya sebagai strategi luas yang digunakan pemerintah untuk melakukan tugasnya. Secara lebih formal,

ini adalah serangkaian tindakan pemerintah bertujuan yang relatif stabil yang menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian sebagian masyarakat. Deskripsi ini berguna karena membantu menjelaskan apa itu kebijakan publik dan apa yang bukan. Pertama, kebijakan publik adalah pedoman untuk tindakan legislatif yang kurang lebih ditetapkan untuk jangka waktu yang lama, bukan hanya perbaikan jangka pendek atau tindakan legislatif tunggal.

Kebijakan juga tidak terjadi secara kebetulan, dan jarang dibentuk hanya sebagai hasil dari janji kampanye seorang pejabat terpilih, bahkan presiden. Sementara pejabat terpilih seringkali penting dalam membentuk kebijakan, sebagian besar hasil kebijakan merupakan hasil dari perdebatan, kompromi, dan penyempurnaan yang terjadi selama bertahun-tahun dan diselesaikan hanya setelah masukan dari berbagai lembaga di dalam pemerintahan serta dari kelompok kepentingan dan publik.

Kebijakan publik sebagai strategi luas yang digunakan pemerintah untuk melakukan tugasnya, serangkaian perilaku pemerintah bertujuan yang relatif stabil yang menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian sebagian masyarakat. Sebagian besar hasil kebijakan merupakan hasil dari perdebatan, kompromi, dan penyempurnaan yang terjadi selama bertahun-tahun dan diselesaikan hanya setelah masukan dari berbagai lembaga dalam pemerintahan. Sebagai contoh kebijakan tentang reformasi birokrasi yang dikembangkan setelah bertahun-tahun melakukan analisis, refleksi atas kebijakan yang ada, dan bahkan penerapan uji coba di tingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat daerah.

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan rencana tersebut, dalam hal ini penyelenggara atau pemerintah yang mengawasi pelaksanaan tujuan tersebut. Administrator dapat secara efektif dan efisien mengelola sumber daya, unit, dan teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan rencana, dan menjelaskan rencana yang telah dibuat serta pedoman yang dapat dengan mudah diikuti untuk melaksanakan rencana tersebut. Berkaitan dengan kajian penelitian tentang implementasi kebijakan Program Lembur Madani Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, model implementasi kebijakan yang digunakan berdasarkan pendapat Cheema dan Rondinelli (Subarsono, 2005, hal. 101) yang meliputi; 1) Kondisi lingkungan; 2) Hubungan antar organisasi, 3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program; dan 4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Selain faktor tersebut terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan menurut Edward III ((Subarsono, 2005, hal. 90) terkait dengan faktor komunikasi, ketersediaan sumberdaya, sikap dari para pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan

METODE

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif naratif, yaitu suatu penelitian dengan memiliki ciri khas meliputi kumpulan naratif (cerita) dari individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif naratif, narasi sering dikumpulkan melalui wawancara, dan bentuk pengumpulan data lainnya, seperti observasi dan

dokumentasi. Analisis data naratif bervariasi karena tidak ada pendekatan universal, namun dalam penelitian naratif telah menerbitkan pedoman dan proses yang telah tersusun sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, teori merupakan komponen utama dalam memandu peneliti untuk melakukan penelitian di lapangan sesuai dengan objek penelitian, khususnya terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Lembur Madani Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar dari pelaksanaan program Lembur Madani, yaitu Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif Sebagai Model Pembangunan Berbasis Partisipasi di Kota Tasikmalaya. Lembur Madani merupakan sebuah kesatuan masyarakat atau komunitas warga dalam wilayah rukun warga atau gabungan rukun warga pada suatu kelurahan yang ditetapkan sebagai model percontohan pembangunan terpadu dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

Adapun yang menjadi sasarannya yaitu **terbentuknya Lembur Madani pada tiap-tiap wilayah kecamatan sebagai model percontohan (*pilot project*); terbentuknya model pembangunan multisektor yang terintegrasi dan berkelanjutan; Terbentuknya sistem informasi manajemen pelayanan sosial terpadu (SIMPADU) pada tiap-tiap wilayah kecamatan sebagai model percontohan (*pilot project*); dan bangkitnya solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat, sehingga dapat menurunkan permasalahan sosial-budaya masyarakat.**

Maksud dari adanya kebijakan tersebut di atas yaitu sebagai pendorong percepatan (akselerator) terwujudnya Masyarakat Madani Kota Tasikmalaya melalui pembentukan Lembur Madani berskala lingkungan (RW atau gabungan RW), dan penggerak dan pengintegrasikan program/kegiatan lintas sektor atau bidang dalam skala lingkungan melalui sistem informasi manajemen pelayanan terpadu (SIMPADU). Sedangkan tujuannya dalam upaya membangun Lembur Madani sebagai miniatur masyarakat madani dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai masyarakat madani; mengintegrasikan berbagai kegiatan multisektor yang saling berkaitan menjadi sebuah model pembangunan terpadu/terintegrasi yang saling mendukung; meningkatkan solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial-budaya pada skala lingkungan.

Pelaksanaan program Lembur Madani di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dengan memiliki luas daratan 19,04 Ha, dimana secara administratif Kecamatan Cibeureum terdiri atas 9 Kelurahan, 87 Rukun Warga (RW) dan 338 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk kurang lebih mencapai 59.045 orang. Sarana sekolah di Kecamatan Cibeureum cukup lengkap, dimana terdapat SLTA/Sederajat sebanyak 9 sekolah, SLTP/Sederajat sebanyak 7, SD/Sederajat sebanyak 20, TK sebanyak 10, TPA sebanyak 10, dan Lembaga Pendidikan Agama sebanyak 33, serta PAUD sebanyak 11. Adapun sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Cibeureum terdapat satu Puskesmas,

3 Puskesmas Pembantu, sebanyak 5 Poliklinik/Balai Pengobatan, dan 10 Apotek, dan terdapat sebanyak 10 Posyandu, serta 5 Toko Obat dan 6 tempat praktek dokter.

Kecamatan Cibeureum merupakan unsur teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani beberapa urusan otonomi daerah. Sementara itu, tugas pembinaan pemerintahan desa dan pelayanan publik juga dilekatkan pada aspek penyelenggaraan kependudukan, pemberdayaan masyarakat, serta penciptaan ketertiban dan ketertiban umum. Kecamatan Cibeureum sendiri merupakan sentra pelayanan publik, ekonomi perdagangan dan jasa skala kota dan regional, terkait dengan perekonomian, sebagai sentra industri tikar mendong, furniture, percetakan dan makanan olahan. Dari RPP Kota Tasikmalaya dengan kemandirian ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita otonomi itu sendiri yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sasaran yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi wilayah dan pemberdayaan sumberdaya lokal melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi masyarakat sesuai dengan kewenangan, peran dan fungsi kecamatan. Hal tersebut tentu sejalan dengan program yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Lembur Madani. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan yang tertuang dalam peraturan Walikota Tasikmalaya terkait dengan program Lembur Madani.

Implementasi kebijakan Program Lembur Madani di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya selalu dilaksanakan di 9 (sembilan) kelurahan dalam setiap tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, diantaranya kondisi lingkungan dengan parameter yang diukur melalui sikap dan tanggapan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Lembur Madani, dan sikap masyarakat penerima program Lembur Madani di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya .

Hasil penelitian menunjukkan sikap dan tanggapan masyarakat masih kurang, dimana masih kurangnya sosialisasi dari pelaksana kebijakan Lembur Madani di tingkat Kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Sosialisasi secara terus menerus dari pelaksana kebijakan kepada seluruh masyarakat sangat diperlukan, agar partisipasi masyarakat dapat meningkat. Hasil pelaksanaan program kegiatan dari adanya program Lembur Madani tentunya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, dengan adanya beberapa program unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor kemampuan komunikasi para pelaksana kebijakan kepada instansi/ organisasi terkait lainnya dalam pelaksanaan program Lembur Madani di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dimana hasil penelitian dilihat dari kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, keterampilan komunikasi antar lembaga swadaya

masyarakat untuk program Lembur Madani. Hasil penelitian menunjukkan untuk pelaksana kegiatan cukup memiliki kemampuan dalam berkomunikasi sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan cukup baik, namun demikian diperlukan pengembangan sumber daya manusia agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan lebih baik.

Pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan terkait program Lembur Madani di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dilihat dari ketersediaan sumber daya yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dukungan dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan, dan kemampuan implementor program Lembur Madani. Berdasarkan hasil penelitian sumber daya manusia yang memadai cukup tersedia dalam pelaksanaan program Gema Madani di setiap Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, namun masih minimnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana, pelaksana kebijakan, diperlukan perekrutan yang baik untuk anggota TPK dan PPL agar mendapatkan orang-orang yang kompeten di setiap bidang atau unit kerja yang ada.

Dari aspek karakteristik dan kemampuan instansi pelaksana, dalam hal ini Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pelaksana Lapangan (PPL) Lembur Madani dilihat dari ketersediaan struktur organisasi, sikap pelaksana program Lembur Madani dan hubungan yang ada cukup baik di antara pelaksana program Lembur Madani di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Meskipun masing-masing pelaksana sudah mengetahui dan memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam program Lembur Madani, namun pelaksana masih kurang melakukan komunikasi melalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat di wilayah kerjanya sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam melaksanakan beberapa program yang termuat dalam program Lembur Madani.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan Program Lembur Madani di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dapat berjalan efektif dengan memperhatikan kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk pelaksanaan program, karakteristik dan kemampuannya. dari lembaga pelaksana. Dari beberapa faktor yang masih perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan yaitu dalam penentuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dibutuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai program yang direncanakan melalui program Lembur Madani agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hoogerwerf. (1992). *Ilmu Pemerintahan* (Tobing (ed.)). Erlangga.
- Kusnandar, I. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Multazam.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.

Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.